

BAB II

LANSKAP GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGIS ANTARA RUSIA

DENGAN NEGARA-NEGARA BALTIK

2.1 Sejarah Hubungan Rusia dan Negara-negara Baltik : Dari Timur Berbalik Ke Barat

Hubungan antara Rusia dengan Negara-negara Baltik dibingkai oleh sejarah yang begitu panjang. Rangkaian tersebut telah menciptakan dampak yang signifikan, baik secara geopolitik maupun geostrategis. Sejarah ketiga negara Baltik berkembang dengan skenario dan alur yang relatif serupa. Sejak awal 1900-an, Estonia, Latvia, dan Lithuania telah menjadi zona yang begitu strategis bagi Kekaisaran Jerman dan Kekaisaran Rusia yang pada saat itu sedang bersaing memperluas kekuasaannya melalui agresi militer. (Misiunas & Bator, 2022) Namun, runtuhnya kekaisaran Jerman dan Kekaisaran Rusia selama Perang Dunia I telah menciptakan kekosongan dan secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi orang-orang Baltik untuk dapat mulai menyusun kemerdekaannya. Meskipun demikian, upaya tersebut masih sulit tercapai karena wilayah Estonia, Latvia, dan Lithuania masih berada dalam penguasaan Jerman dan Rusia. Tercatat, pada November 1917, saat Revolusi Bolshevik di Petrograd (sekarang Saint Petersburg), seluruh Lithuania dan sebagian besar Latvia berada di bawah pendudukan militer Jerman. Estonia dan bagian timur Latvia masih berada di bawah kendali Rusia. (Stanford, 2019)

Pembagian kekuasaan atas tiga wilayah Baltik kemudian mengalami perubahan yang disebabkan oleh Perjanjian Brest-Litovsk pada 3 Maret 1918, akibat dari kekalahan Bolshevik Rusia atas Jerman pada perang di penghujung musim dingin 1918. Pada perjanjian tersebut, Rusia harus kehilangan wilayah Ukraina, Polandia, Baltik, dan Finlandia. Pada tahun 1918, Jerman memberikan ketiga wilayah Baltik otoritas untuk memimpin pemerintahannya sendiri dengan mendeklarasikan kemerdekaan. Meskipun demikian, Rusia menganggap kemerdekaan yang diperoleh Estonia, Latvia, dan Lithuania sebagai kemerdekaan semu karena pada kenyataannya ketiga otoritas tersebut merupakan otoritas boneka dibawah pemerintah Jerman.

Kekuasaan Jerman di wilayah Baltik pada akhirnya tidak berlangsung lama. Pada November 1918, setelah revolusi yang terjadi di Jerman, ditandai dengan runtuhnya kekaisaran Kaisar Wilhelm II. Rusia secara perlahan ingin merebut pemerintahan tiga otoritas wilayah Baltik dari tangan Jerman dengan mengandalkan kelompok lokal pro Bolshevik. Pejuang lokal yang merupakan orang-orang Baltik juga ingin memanfaatkan revolusi Jerman sebagai momen untuk memperoleh kemerdekaan secara penuh dari Jerman dan Rusia. Itu ditandai dengan pecahnya peperangan antara unit militer Latvia dan Estonia melawan divisi Baltik Jerman serta Rusia. (Richter, 2014) Sejak September 1919, Bolshevik Rusia melakukan pendekatan secara lebih diplomatis ke tiga otoritas wilayah Baltik dengan mengirimkan proposal untuk melakukan negosiasi damai. Proposal itu kemudian disetujui secara bertahap oleh Estonia pada 2 Februari 1920. Lithuania pada 11 Juli 1920 dan Latvia pada 12 Agustus

1920. Kekuatan Entente mengakui kemerdekaan Estonia dan Latvia pada tahun 1921, dan kemerdekaan Lithuania pada tahun 1922.

Pada tahun-tahun pertama kemerdekaan negara-negara Baltik, partai-partai politik dibentuk di kiri dan kanan dan bersaing memperebutkan kekuasaan dalam pemilihan umum. Sekelompok politisi muncul di antaranya Kārlis Ulmanis di Latvia; Konstantin Päts di Estonia; dan Antanas Smetona di Lituania yang akan memainkan peran utama di negara mereka selama bertahun-tahun. Selama akhir 1920-an dan awal 1930-an, ketika situasi politik di Eropa menjadi lebih tidak stabil dan kediktatoran diberlakukan di banyak negara, rezim otoriter didirikan di ketiga negara Baltik. Dipimpin oleh Ulmanis, Päts, dan Smetona, ini bukan pemerintahan totaliter seperti Uni Soviet dan Nazi Jerman, tetapi mereka membatasi kebebasan politik. Partai politik seperti Sosial Demokrat dilarang. (Rauch, 1974)

Periode pertama kemerdekaan republik-republik Baltik berakhir pada tahun 1939, ketika Stalin dan Hitler menyetujui pakta non-agresi melalui Pakta Molotov-Ribbentrop yang membagi seluruh Eropa timur menjadi wilayah pengaruh Jerman dan Soviet. Polandia timur dari garis yang dibentuk oleh sungai Narew, Vistula, dan San akan jatuh di bawah lingkup pengaruh Soviet. Protokol tersebut juga menetapkan Latvia, Estonia, Lithuania, dan Finlandia ke dalam lingkup pengaruh Soviet dan, lebih lanjut, membahas topik pemisahan Bessarabia dari Rumania. (Wettig, 2008) Ketiga republik Baltik kemudian dianeksasi oleh Uni Soviet dan diorganisir sebagai republik Soviet pada Agustus 1940.

Di bawah pemerintahan Soviet pada tahun 1940–1941, ribuan pejabat Estonia, Latvia, dan Lituania, intelektual, dan lainnya dideportasi ke Siberia. Ketika Tentara Nazi Jerman menginvasi Uni Soviet pada tahun 1941 melalui operasi Barbarossa, negara-negara Baltik berada di bawah kekuasaan Nazi. Pada saat itu, sebagian besar rakyat Baltik menjadi korban kejahatan perang. Banyak dari mereka, terutama orang-orang Yahudi yang ditinggal di wilayah Baltik harus menderita di dalam kamp konsentrasi Jerman. (Falkov, 2019)

Pada awal tahun 1945, kekuatan militer Jerman mengalami kemunduran akibat dari pukulan yang sangat kuat dari Sekutu dan Uni Soviet. Wilayah Baltik mulai direbut Uni Soviet kembali dari kekuasaan Jerman. Pada April 1945, pasukan Soviet berhasil mengepung ibukota Jerman, Berlin. Pada 7 Mei 1945, Jerman menyerah tanpa syarat kepada Sekutu Barat di Reims dan pada 9 Mei kepada Soviet di Berlin. Pada akhir Perang Dunia II, gelombang orang-orang Baltik yang berpindah ke wilayah Eropa dan Amerika Serikat semakin banyak karena mereka takut akan kembalinya kekuasaan Uni Soviet di Baltik. (Hiden & Salmon, 1994)

Setelah kekalahan Jerman, Uni Soviet kembali menaruh kekuasaannya kembali di wilayah Baltik melalui aneksasi. Di bawah pemerintahan Uni Soviet dari tahun 1944 hingga 1990, Estonia, Latvia, dan Lithuania tampaknya benar-benar menghilang dari peta politik internasional. Karena gerakan politik dan pemerintahan lokal tidak memiliki legitimasi serta kekuatan yang berpengaruh semenjak invasi Jerman. Namun, selama dekade terakhir Perang Dingin, kaum muda di negara-negara Baltik mulai

berpartisipasi dalam bentuk-bentuk budaya alternatif, dan para pengkritisi serta pembangkang mulai mengekspresikan diri mereka secara lebih terbuka.

Pada akhir 1980-an, sistem yang dianut Soviet mulai mengalami keretakan dan berpengaruh terhadap kondisi politik di wilayah Baltik. Pasukan keamanan Soviet, terutama KGB, berusaha menekan semua gerakan pembangkangan dan oposisi, namun mereka tidak berhasil. Selama akhir 1980-an, dorongan untuk kemerdekaan baru bagi negara-negara Baltik semakin kuat di ketiga negara Baltik dan tidak dapat dibendung, meskipun upaya Soviet terus berlanjut untuk melakukannya. Demonstrasi diadakan, selebaran dan teks diterbitkan, semuanya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menegakkan kembali kedaulatan yang telah hilang pada tahun 1939. Perlahan tapi pasti, gerakan politik Estonia, Latvia, dan Lituania mulai menantang otoritas pemerintahan Soviet secara terbuka. (Hiden & Salmon, 1994) Perlawanan sering terbentuk dalam budaya tradisional, termasuk dalam festival lagu massal yang populer di kalangan orang Baltik. Salah satu peristiwa paling fenomenal yang pernah dilakukan oleh ketiga negara Baltik adalah Baltic Way. Dimana ketiga negara Baltik menginginkan kemerdekaannya kembali, aksi tersebut juga menggambarkan solidaritas dan kedekatan tiga negara Baltik.

Meskipun protes di negara-negara Baltik sebagian besar tanpa kekerasan, gerakan kemerdekaan akhirnya menghadapi tindakan represif oleh pasukan keamanan Soviet. Pada Januari 1991, empat belas warga sipil terbunuh di Vilnius oleh pasukan Soviet. Pada 20 Januari, lima orang, termasuk dua polisi, kehilangan nyawa mereka di

Rīga. Keinginan ketiga Baltik untuk memperoleh kemerdekaannya kembali kemudian menemukan titik terang dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Sesaat setelah itu negara-negara Baltik secara bertahap mendeklarasikan kemerdekaannya. Mengamankan kemerdekaan mereka tidak mengakhiri masalah negara-negara Baltik. Sistem Soviet yang mereka lawan harus benar-benar diubah, dengan munculnya ekonomi pasar dan praktik demokrasi. (Trapans, 1994) Negara-negara Baltik memulai kemerdekaannya dengan tingkat pendapatan dan produk domestik bruto yang rendah. Mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat. Oleh karena itu, beberapa tahun setelah kemerdekaan, ketiga negara Baltik secara perlahan mulai mengadopsi praktik ekonomi dan sistem politik barat, salah satunya dengan mengajukan proposal untuk menjadi bagian dari Uni Eropa dan NATO. Pada tahun 2004, mereka bergabung dengan Uni Eropa dan NATO.

Masuknya ketiga negara Baltik ke blok NATO tentunya menjadi pukulan tersendiri bagi Rusia. Karena disaat yang sama, Rusia tidak dapat bertindak lebih untuk melakukan intervensi ke otoritas Baltik supaya tidak bergabung NATO. Mengingat, mencari masalah dengan negara-negara Baltik dapat diterjemahkan sebagai awal perang melawan NATO dengan prinsip keamanan kolektifnya. Namun, Rusia tentunya memiliki banyak opsi untuk meminimalisir ancaman yang ditimbulkan dari perluasan NATO ke negara-negara Baltik. Dalam hal ini, Rusia melakukan strategi kampanye propaganda serta ancaman secara lebih lunak dan terselubung. Cara Rusia untuk

mengintervensi negara-negara Baltik ini dinamakan sebagai strategi perang hibrida. Dalam waktu tertentu, intensitas dari kampanye dan ancaman hibrida dapat meningkat apabila dibutuhkan. Karena melalui strategi ini, Rusia dapat menciptakan kerentanan pada beberapa aspek tertentu terhadap ketahanan nasional ketiga negara Baltik.

2.2 Integrasi Politik Negara-negara Baltik

Negara-negara Baltik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut tiga negara berdaulat pecahan Uni Soviet yang berada di pesisir laut Baltik, meliputi Estonia, Latvia dan Lithuania. (Misiunas, 2020) Hubungan antara ketiga negara Baltik dirumuskan dalam sejarah panjang yang dibangun atas dasar solidaritas dan komitmen bersama bahkan sebelum Uni Soviet bubar pada 1991. Salah satu momen kedekatan tiga negara Baltik dapat digambarkan melalui gerakan The Baltic Way pada 23 Agustus 1989, dimana sekitar dua juta penduduk negara-negara Baltik melakukan demonstrasi damai menuntut pengakuan klausul rahasia dalam pakta Molotov-Ribbentrop dan pembentukan kembali kemerdekaan negara-negara Baltik dengan bergandengan tangan menciptakan rantai manusia melintasi tiga negara Baltik dari kaki Toompea di Tallinn (Ibukota Estonia) ke kaki Menara Gediminas di Vilnius (Ibukota Lithuania), melewati Riga (Ibukota Latvia) hingga ke Sungai Daugava sepanjang 677,5 km. Demonstrasi ini diselenggarakan oleh gerakan nasional masing-masing Negara Baltik yaitu Front Populer Latvia, Front Populer Estonia Rahvarinne dan Gerakan Reformasi Lituania Sajūdis. (UNESCO, 2008) The Baltic Way adalah sebuah fenomena yang menunjukkan bagaimana tiga negara Baltik, terlepas dari karakteristik nasional

individu mereka yang unik, menciptakan sinergi spiritual lintas budaya baik secara internal maupun antara negara-negara Baltik atas nama tujuan bersama untuk mengatasi konsekuensi dari Perang Dunia II dan untuk menghancurkan rezim totaliter. The Baltic Way adalah simbol bersejarah yang hidup dalam ingatan kolektif, memperkaya pemahaman tentang rasa dan nilai solidaritas dan kebebasan berekspresi.

Jauh sebelum peristiwa The Baltic Way kerjasama antara Estonia, Latvia dan Lithuania untuk pertama kalinya secara formal mulai dilakukan pada 1920-an dan 1930-an setelah ketiga negara tersebut mencapai kemerdekaan. Kemudian, kerjasama dengan skala yang lebih besar terlihat kembali pada akhir 1980-an dan awal 1990-an dalam perjuangan untuk memulihkan kemerdekaan nasional. (Stanford, 2019) Kerjasama skala penuh antara Estonia, Latvia dan Lituania dibangun kembali pada 12 Mei 1990 melalui Deklarasi Persatuan dan Kerjasama oleh Republik Estonia, Republik Latvia dan Republik Lituania yang ditandatangani di Aula Putih Riigikogu di Tallinn. (Ministry of Foreign Affairs Republic of Estonia, 1990) Keputusan itu sejalan dengan Perjanjian tentang Kerukunan dan Kerjasama yang dibuat antara tiga negara Baltik pada 1934 di Jenewa. Setelah pemulihan kemerdekaan, struktur kerjasama antar pemerintah dan antar parlemen dengan cepat disusun dan dibangun. Pada 1994, seluruh rangkaian dokumen dasar disetujui. Sejak 2004, aktivitas di NATO dan Uni Eropa, telah menjadi bidang kerja sama yang penting. Pada periode yang sama, beberapa perubahan juga dilakukan untuk membuat kolaborasi yang lebih komprehensif. (Ministry of Foreign Affairs Republic of Latvia, 2021)

Dalam mengintegrasikan dan mempererat kesatuan hubungan antara ketiga negara Baltik, pemerintah dan parlemen Estonia, Latvia, dan Lituania membentuk forum kerjasama melalui *Baltic Council of Ministers* (Dewan Menteri Baltik) dan *Baltic Assembly* (Majelis Baltik) yang dipimpin serta dikoordinasi secara bergilir oleh perwakilan tiap negara. Setelah Estonia, Latvia, dan Lituania bergabung dengan NATO dan Uni Eropa, wewenang pengambilan keputusan dalam beberapa hal berubah, ruang lingkup diperluas, dan kerja sama sehari-hari antar pejabat melibatkan peningkatan jumlah mitra dalam kerangka wilayah kerja sama. Dalam beberapa tahun terakhir, bidang kerja sama yang paling penting adalah kebijakan luar negeri dan keamanan, kerja sama pertahanan, energi, dan transportasi. Kerjasama di bidang ekonomi menjadi lebih berbasis proyek, bertumpu pada kepentingan bersama. Upaya bersama negara-negara Baltik bersifat pragmatis dan praktis.

Format kerjasama antara pemerintah negara-negara Baltik melalui Dewan Menteri Baltik bertindak sesuai dengan kerangka acuan yang ditandatangani pada 1994. (Ministry of Foreign Affairs Republic of Estonia, 2003) Dewan Menteri Baltik memastikan koordinasi dan kesinambungan kerjasama antara pemerintah dari ketiga negara tersebut. Dewan Menteri Baltik hanya dapat mengambil keputusan jika perwakilan dari ketiga negara Baltik hadir. Dewan Menteri Baltik membuat keputusan berdasarkan konsensus dan keputusannya mengikat untuk negara-negara Baltik. Dewan Perdana Menteri, sebagai organ tertinggi dalam Dewan Menteri Baltik, memberikan panduan untuk kerjasama antar pemerintah negara-negara Baltik. Dewan

Menteri Baltik bertemu di tingkat perdana menteri setahun sekali yang umumnya dilakukan pada akhir tahun; pertemuan informal telah terjadi setidaknya paling sedikit sekali setahun. Lima Komite Pejabat Senior telah dibentuk di dalam Dewan Menteri Baltik yang mewakili masalah energi, transportasi, pertahanan, lingkungan, dan internal. Setiap komite dapat membuat sub-komite di area tertentu untuk mengatur kegiatannya sendiri. Pekerjaan Komite Pejabat Senior pada dasarnya digantikan oleh format pertemuan berbasis kebutuhan konvensional di setiap sektor. Pada 2019, Perdana Menteri Baltik bertemu dalam format Dewan Perdana Menteri di Riga pada 4 Februari, 23 Agustus, dan 6 Desember. Selama pertemuan Agustus, mereka juga menghadiri acara peringatan 30 tahun Baltic Way bersama-sama. Pertemuan Desember juga dihadiri oleh para Menteri Baltik yang membidangi transportasi untuk membahas proyek Rail Baltic dan juga ada pertemuan terpisah antara Perdana Menteri Baltik dan Perdana Menteri Polandia.

Selain Komite Pejabat Senior, perdana menteri juga dapat membentuk satuan tugas, yang berkumpul dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi tugas tertentu di luar yurisdiksi Komite Pejabat Senior. Pertemuan tahunan menteri luar negeri ketiga negara Baltik dalam *Cooperation Council* biasanya terjadi dalam kerangka Dewan Menteri Baltik yang merupakan format untuk kerjasama antara pemerintah dan parlemen. Pertemuan Dewan Baltik berlangsung setahun sekali dalam kerangka sesi Majelis Baltik. Selama Dewan Baltik, menteri luar negeri dari negara ketua bergilir menyajikan gambaran umum kepada Majelis Baltik tentang kerjasama antara negara-

negara Baltik pada tahun lalu dan rencana untuk masa depan. Kerjasama antara Dewan Menteri Baltik dan Majelis Baltik berlangsung berdasarkan kesepakatan. Melalui mereka, keberadaan Dewan Baltik dan aktivitas Dewan Kerjasama diatur. Kerjasama terjadi di semua tingkatan: Presidium Majelis Baltik dan Dewan Kerjasama bertemu dalam kerangka Dewan Baltik; pejabat senior komite Dewan Menteri Baltik diundang ke sesi komite Majelis Baltik dan konferensi tematik.

Majelis Baltik adalah lembaga yang menaungi kerjasama antara Latvia, Estonia dan Lithuania. Majelis Baltik didirikan pada 8 November 1991. Setiap negara Baltik diwakili oleh 12-16 anggota parlemen. Ketua Majelis Baltik bertepatan dengan kepemimpinan Dewan Menteri Baltik dan berlangsung selama satu tahun kalender. Majelis Baltik bersidang setahun sekali untuk sesi. Di antara sesi-sesi, pekerjaan Majelis Baltik dikoordinasikan oleh Presidium yang bertemu enam kali setahun, yang ketuanya adalah pemimpin delegasi negara ketua ke Majelis Baltik. Majelis Baltik merupakan lembaga koordinasi dan konsultatif. Majelis Baltik memiliki hak untuk membuat pandangannya diketahui oleh parlemen nasional, pemerintah dan Dewan Menteri Baltik dalam bentuk resolusi, keputusan, deklarasi dan rekomendasi. Majelis Baltik juga dapat menyampaikan pandangannya ke organisasi regional maupun internasional dalam bentuk banding, proposal, atau pengumuman. Dalam forum, Presidium Majelis Baltik dapat membuat keputusan tentang isu-isu saat ini. Majelis Baltik memiliki lima komite tetap. Sejak 1994, Penghargaan Majelis Baltik untuk

pencapaian penting dalam sastra, seni, dan sains diberikan setahun sekali. Sejak 2011, penghargaan tersebut diberikan melalui *Baltic Innovation Prize*.

Integrasi dan solidaritas dari Negara-negara Baltik merupakan salah satu bentuk regionalisme yang berbeda jika dibandingkan dengan regionalisme di Asia Tenggara (ASEAN) dan Eropa (UE), dimana dinamika dan orientasi politik negara-negara anggotanya masih relatif terpolarisasi.

2.3 Dinamika Geopolitik Negara-negara Baltik dan Rusia

Permasalahan antara negara-negara Baltik dan Rusia pasca konflik Krimea juga menciptakan fenomena geopolitik yang kompleks. Dimulai dari krisis politik di Ukraina yang berakhir pada masuknya Republik Krimea kedalam Federasi Rusia membuat negara-negara Baltik menjadi khawatir terhadap aksi lanjutan yang berpotensi untuk mengancam kawasannya. Hal tersebut didasari oleh persebaran penutur Rusia yang belum terintegrasi secara menyeluruh khususnya di beberapa wilayah Estonia dan Latvia sehingga dibandingkan dengan Lithuania, kedua negara tersebut lebih rentan terkena kampanye perang hibrida oleh Rusia. Negara-negara Baltik juga khawatir terhadap ancaman dari *information warfare* yang dilakukan media berbahasa Rusia melalui narasi provokasi dan propaganda yang berpotensi memicu disintegrasi penutur Rusia yang berada di negara-negara Baltik. Mengingat, tingkat diskriminasi terhadap penutur Rusia di negara-negara Baltik masih menjadi isu yang hangat, terutama di Moskow. Dalam menangani hal tersebut, negara-negara Baltik memiliki respon yang berbeda, Latvia dan Lithuania memilih untuk memberikan

hukuman untuk media-media berbahasa Rusia yang terbukti memberikan informasi palsu dan penggiringan opini publik yang berpotensi menimbulkan disintegrasi. Sedangkan Estonia berupaya untuk memberikan pendekatan yang berbeda dengan mendirikan saluran berbahasa Rusianya sendiri untuk menetralsir kampanye liar dari media berbahasa Rusia. (Aznor, 2018)

Jika dilihat dari keikutsertaan Rusia pada beberapa konflik yang pernah terjadi di Ukraina timur, Krimea, Ossetia Selatan-Georgia, Abkhazia, dan Transnistria-Moldova. Intervensi Rusia pada konflik-konflik tersebut tidak terlepas dari masalah warisan politik Uni Soviet yang masih tersisa, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh Rusia di beberapa negara bekas Uni Soviet. Mengingat Presiden Putin pernah mengatakan bahwa dia akan melakukan apa yang diperlukan untuk "melindungi warga dan rekan senegarannya Rusia". Hal tersebut juga sesuai dengan jajak pendapat yang dilakukan oleh All-Russian Public Opinion Research Center (VTsIOM) menunjukkan bahwa 71 persen responden mendukung usulan amandemen konstitusi Rusia yang menyatakan bahwa pemerintah Rusia bertanggung jawab untuk membela rekan senegarannya di luar negeri. (WCIOM, 2020) Ini telah menjadi sumber kekhawatiran utama bagi negara-negara Baltik terutama terhadap kekuatan dan pengaruh Rusia yang juga dapat dilihat didalam politik domestik negara-negara Baltik. Ditengah ketimpangan kekuatan antara negara-negara Baltik dan Rusia, ketiga negara Baltik pada akhirnya mengizinkan NATO dan Uni Eropa untuk mengambil bagian dalam proses geopolitiknya terhadap Rusia karena dianggap memiliki pengaruh dan kekuatan

yang relatif setara, baik dalam hal militer maupun politik internasional. Bahkan pada tahun 2014, beberapa saat setelah konflik Krimea, Amerika Serikat melalui pidato Barack Obama di Tallin, membuat komitmen secara eksplisit untuk melindungi negara-negara Baltik dari Rusia.

“We’ll be here for Estonia. We will be here for Latvia. We will be here for Lithuania. You lost your independence once before. With NATO, you will never lose it again,” (The White House President Barack Obama, 2014)

Memasnya situasi geopolitik antara negara-negara Baltik dengan Rusia juga tidak terlepas dari perluasan serta kehadiran NATO dan Uni Eropa kedalam dinamika geopolitik kawasan itu, terutama pasca konflik Krimea. (Yani, 2010) Rusia menginterpretasikan meningkatnya keikutsertaan NATO dan Uni Eropa sebagai potensi ancaman yang dapat membahayakan stabilitas keamanan Rusia. Selain itu, ketidaksetujuan Rusia juga ditunjukkan dari ditariknya Valery Yevnevich sebagai perwakilan militer dalam dewan kerjasama NATO-Rusia pada 2014. Rusia juga memutuskan untuk mundur dari traktat *Conventional Armed Forces in Europe* pada 2015 karena dianggap tidak berguna baik secara politis maupun praktis. Menurut Andrey Kortuno yang merupakan Direktur Jenderal Dewan Urusan Internasional Rusia, tindakan mundurnya Rusia diterjemahkan sebagai reaksi demonstratif terhadap meningkatnya aktivitas NATO dan negara-negara Barat di sepanjang daerah perbatasannya.

Dari sisi eksternal, Rusia juga turut memperkuat aliansinya, terutama dengan Tiongkok serta Iran dan beberapa negara lain di Asia Tengah, Pakistan hingga India melalui *Shanghai Cooperation Organisation* (SCO) yang didirikan pada tahun 2001. SCO berfungsi sebagai blok keamanan dan juga kerjasama diberbagai bidang seperti ekonomi dan politik. Berdirinya SCO melahirkan paradigma baru dimana uniteralisme dan pengaruh Amerika Serikat serta aliansinya telah mendapatkan kekuatan tandingan yang membuat tatanan dunia internasional menjadi multipolar. Hadirnya SCO tentunya berdampak pada naiknya nilai tawar Rusia dalam situasi geopolitik di Eropa Timur khususnya dengan negara-negara Baltik dan aliansinya.

2.4 Tantangan Geostrategis Negara-negara Baltik dan Rusia

Meningkatnya eskalasi konflik antara negara-negara Baltik dengan Rusia juga dapat dianalisis menggunakan konsep geostrategi untuk melihat bagaimana negara-negara tersebut mempersepsikan ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan negara mereka. Dalam menghadapi ancaman yang datang dari negara-negara Baltik dan aliansinya, Rusia memiliki strategi pertahanan dan keamanan yang mumpuni baik dari segi kapasitas, kapabilitas, dan penempatan. Dalam menghadapi serangan militer dari negara-negara Baltik dan NATO, Rusia memiliki *Western Military District* (WMD) yang disiapkan untuk menangkal dan melakukan serangan dalam kondisi darurat dengan skala besar. Meskipun beberapa unit saat ini dikerahkan di dekat Ukraina Timur, karena konflik yang sedang berlangsung di sana. Secara geografis, Rusia memiliki keunggulan dalam hal waktu, kekuatan, dan jarak dalam

menghadapi negara-negara Baltik dan NATO. Hal tersebut dapat dilihat dari terbukanya wilayah negara-negara Baltik terhadap skenario serangan Rusia. Kemudian, faktor kedekatan antara Belarus dengan Rusia sebagai aliansi tentunya memberikan ruang tambahan yang menguntungkan bagi Rusia karena akses dan mobilitas menuju Kaliningrad dan wilayah negara-negara Baltik menjadi semakin terjangkau.

Kaliningrad merupakan eksklave Rusia yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan strategis dari negara itu di Eropa Timur terutama semenjak Polandia dan negara-negara Baltik menjadi bagian dari Uni Eropa dan NATO sehingga wilayah ini berperan sebagai benteng terluar pertahanan Rusia terhadap berbagai ancaman dari Eropa Timur. Rusia selama satu dekade terakhir telah meningkatkan kekuatan militernya di Kaliningrad dengan menempatkan seluruh divisi tentara Rusia. Selain kehadiran militer yang meningkat di darat, Rusia memiliki lima atau enam kapal yang berlabuh di pangkalan angkatan laut di Baltiysk dan pasukan helikopter yang cukup besar di pangkalan udara angkatan laut Chkalovsk. Baltiysk atau *Baltic Sea Fleet* adalah satu-satunya pelabuhan yang mampu beroperasi secara maksimal tanpa hambatan bongkahan es yang menutupinya sepanjang tahun sehingga secara efektif mampu menghadapi armada laut dari musuhnya di wilayah itu. Selain itu, nilai tawar Rusia di Kaliningrad terhadap NATO dan negara-negara sekutunya di Eropa juga diperjelas dengan penempatan rudal balistik yang dapat menjangkau sebagian besar Eropa. Vladimir Shamanov, kepala Komite Pertahanan Rusia, mengatakan bahwa

rudal di Kaliningrad adalah "tanggapan langsung terhadap langkah-langkah yang diambil oleh NATO" (Sabak, 2016)

Dalam simulasi invasi Rusia terhadap negara-negara Baltik yang dilaporkan oleh RAND, Rusia dapat menduduki ibukota negara-negara Baltik dalam kurung waktu 36 hingga 60 jam dimana menurut David Shlapak dan Michael Johnson, dalam simulasi itu, Amerika Serikat dan sekutunya tidak memiliki struktur militer yang cukup kuat untuk menghadang serangan darat dan udara Rusia yang dapat datang dari berbagai penjuru. (Shlapak & Johnson, 2016) Hal tersebut juga diyakini oleh Letnan Jenderal Ben Hodges, mantan Panglima Angkatan Darat Eropa Amerika Serikat, mengakui bahwa Rusia bisa mengambil alih negara-negara Baltik lebih cepat daripada yang bisa kita lakukan untuk mempertahankannya. (Global Security, 2017)

Meskipun negara-negara Baltik secara perimbangan posisi geostrategis dan militer jauh tertinggal dibawah Rusia namun dilain sisi Rusia juga memiliki permasalahan geostrategis yang tidak kalah rumit. Dimana semenjak runtuhnya Uni Soviet, negara itu telah banyak kehilangan pengaruh dari daerah penyangganya terutama yang berbatasan langsung dengan Eropa. Selain itu, agenda perluasan di Eropa Timur semakin mendekatkan kekuatan militer Amerika Serikat dan aliansinya terhadap titik-titik penting Rusia. Salah satunya dengan pembangunan *Ballistic Missile Defense* (BMD) atau *European Phased Adaptive Approach for Missile Defense* (EPAA) yang juga melibatkan negara-negara NATO, salah satunya adalah Polandia dengan situs Aegis Ashore-nya. (Braub & Racz, 2021)Hal tersebut tentunya

memunculkan keawatiran tersendiri terhadap Rusia karena sistem rudal balistik musuhnya sudah berada dipelataran negaranya. Meskipun Aegis Ashore adalah situs yang dibangun sebagai sistem pertahanan namun perlu diketahui bahwa instalasi peluncur roketnya juga dapat digunakan untuk rudal berhulu ledak nuklir yang berpotensi mengancam pertahanan dan keamanan wilayah Rusia. Jauh sebelum itu, Vladimir Putin menganalogikan BMD seperti situs rudal Uni Soviet di Kuba yang dapat membahayakan keamanan negara musuh didekatnya. (Eckel, 2007)

“The situation is quite similar technologically for us [Russian missile base in Cuba]...We have withdrawn the remains of bases from Vietnam and Cuba, but such threats are being created near our border,” (Vladimir Putin, 2007)

Sebagai alternatif pilihan untuk memperkuat *bargaining* negara-negara Baltik terhadap ancaman Rusia. Secara geostrategis, NATO dapat memanfaatkan kekuatan kolektifnya disekitar perbatasan Baltik dan laut Hitam untuk menekan Rusia. Mengingat bahwa NATO mengadopsi konsep *Collective Security* dimana ancaman terhadap anggotanya adalah ancaman terhadap anggota lainnya sehingga tindakan agresif Rusia terhadap negara-negara Baltik tentunya akan memicu respon serentak dari seluruh anggota NATO yang berada disekitar Rusia.

2.5 Kampanye Hibrida Rusia Terhadap Negara-negara Baltik

Perang hibrida merupakan konsep strategi peperangan baru dalam lingkup kajian studi geostrategis. Berbeda dengan ancaman perang secara konvensional, perang hibrida adalah tindakan yang dapat disangkal atau dilakukan secara terselubung oleh

agresor di negara target yang melibatkan instrumen kekuasaan seperti serangan siber (tidak sama dengan serangan bersenjata), operasi informasi, tekanan ekonomi, atau aktivitas tidak bersahabat lainnya yang sering dilakukan oleh pihak ketiga yang biasanya melibatkan aktor non-negara. Taktik ini disesuaikan dengan kerentanan spesifik dalam fungsi sosial negara target. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi persepsi warga negara di negara sasaran dan untuk menciptakan efek di seluruh masyarakat, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, tanpa memicu tanggapan yang tegas, termasuk tanggapan bersenjata. (Giegerich, 2016) Eskalasi ancaman hibrida akan meningkat apabila aktivitas kampanye hibrida semakin dikoordinasikan dan disinkronkan sehingga ketahanan suatu negara mengalami pelemahan yang signifikan, dalam kondisi tertentu penggunaan operasi militer dapat dilakukan untuk memberikan dukungan yang lebih komprehensif sehingga keuntungan maksimal dapat diraih. Mengingat karakter tindakan hibrida yang dapat disangkal, terselubung, dan ambigu, masalah realisasi apakah suatu negara sedang menghadapi skenario perang hibrida atau tidak, akan memberikan kerumitan tersendiri. Idealnya, negara harus bereaksi terhadap ancaman hibrida sebelum situasi berkembang menjadi perang hibrida dengan skala yang lebih masif.

Bergabungnya ketiga negara Baltik ke dalam aliansi NATO dan Uni Eropa tentunya menjadi kabar buruk bagi Rusia karena zona ancaman menjadi semakin dekat dengan Moskow. Hal tersebut membuat Rusia harus menyiapkan strategi yang lebih komprehensif untuk meminimalisir atau bahkan meniadakan potensi ancaman yang

dianggap membahayakan kedaulatan negaranya. Salah satunya dengan menggunakan strategi perang hibrida. Ini serupa dengan strategi yang digunakan oleh Uni Soviet pada tahun 1920-an, yaitu maskirovka atau masking. Dimana Rusia menggunakan kekuatan lunak, yaitu informasi, untuk mengecoh lawan dengan menyebarkan kabar menyesatkan mengenai keberadaan, disposisi pasukan, tujuan, propaganda, kesiapan tempur, dan rencana strategis militer Rusia. Melalui strategi maskirovka, Rusia menggunakan narasi strategis untuk membuat lawan terintimidasi, bingung, dan cemas. (Maier, 2016)

Strategi Maskirovka Rusia saat ini telah menjelma sebagai strategi perang modern melalui strategi perang hibrida dengan melibatkan berbagai macam aspek dalam suatu negara secara lebih komprehensif. Strategi ini, dinamai sebagai strategi hibrida atau campuran karena suatu negara agresor menggunakan perpaduan kekuatan lunak dan kekuatan keras untuk melemahkan negara target. Artinya, kekuatan lunak, seperti disinformasi, propaganda, serangan siber, dll memiliki peran yang setara dengan kekuatan keras melalui penggunaan unsur militer. Di beberapa kasus, Rusia telah menggunakan strategi perang hibrida, ini telah terbukti di konflik antara Rusia dengan Georgia, Ukraina, dan tak terkecuali negara-negara Baltik. Sebagian besar konflik yang terjadi di Eropa Timur umumnya disebabkan oleh alasan relatif sama, yaitu Rusia terusik dengan perluasan Barat ke wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Rusia.

Dari ketiga negara Baltik, dampak dari kampanye perang hibrida lebih dirasakan oleh negara dengan penutur Rusia yang banyak, seperti Latvia yang mencapai 26,9 persen dan Estonia 24,6 persen. Sedangkan Lithuania memiliki jumlah penutur Rusia yang paling sedikit dengan 5,8 persen dari total populasi. (Radin, 2017) Kampanye hibrida Rusia didominasi oleh aktivitas yang melibatkan budaya, informasi, dan komunikasi. Serangan hibrida yang sering dilakukan oleh Rusia selama beberapa dekade terakhir dilakukan dengan cara meminimalisir pengaruh media barat, disinformasi, propaganda massal, hingga mendistorsi ingatan sejarah negara target dengan tujuan untuk melemahkan identitas nasional. Salah satu alasan mengapa Rusia memiliki peluang untuk dapat melancarkan serangan hibrida karena sistem dan bentuk pemerintahan demokratis negara-negara Baltik yang menjunjung tinggi kebebasan pers dan politik telah memberikan ruang bagi Rusia untuk menyebarkan pengaruhnya. (Kols, 2022) Ini tentunya membuat Rusia lebih leluasa untuk mengintervensi aspek-aspek tertentu dari negara-negara Baltik.

Rusia memiliki jaringan pers internasional yang secara resmi teraliansi dan dibiayai oleh pemerintah Rusia. Jaringan ini diantaranya, RT atau sebelumnya dinamakan Russia Today dan Sputnik. Kedua jaringan tersebut dianggap telah terlibat dalam disinformasi dan propaganda Rusia sehingga seringkali mendapatkan pengecaman dari pemerintah ketiga negara Baltik. Rusia juga memiliki saluran swasta lain, seperti PBK (Pervyi Baltyiski Kanal – Saluran Baltik Pertama), NTV-Mir, TV REN Rusia, dan RTR-Planeta yang bisa dinikmati oleh penutur Rusia di negara-negara

Baltik. Melalui jaringan pers yang dimilikinya, Rusia seringkali menyisipkan narasi disinformasi dan propaganda secara terselubung dengan menghidupkan kembali isu kebangkitan nazisme, adanya russophobia, hingga isu bahwa Baltik merupakan boneka NATO. (Stoicescu, 2021) Narasi-narasi tersebut ditujukan untuk mempengaruhi opini publik penutur Rusia di negara-negara Baltik. Berikut ini adalah salah satu contoh dari propaganda Rusia melalui salah jaringan pers yang dimilikinya, Sputnik, sebelumnya bernama RIA Novosti. (RIA Novosti, 2015)

Gambar 2.1 Propaganda Rusia Melalui Kanal Berita Ria Novosti

The image shows a screenshot of a news article from RIA Novosti. The header includes the RIA Novosti logo, the date '16 июля 23:54 МСК', and currency exchange rates for USD (59.88 -0.30) and EUR (68.36 -0.45). The temperature in Warsaw is shown as +20 °C. The article title is 'Зурофф: нацизм расцвел в Прибалтике после вступления в ЕС и НАТО'. Below the title, it shows the date '23:22 29.03.2015' and the update time '(обновлено: 23:47 29.03.2015)'. The article features a photograph of a crowd of people holding red and white flags, likely a nationalist demonstration. The photo is credited to 'AP Photo / Roman Kolesny'.

Sumber: Ria Novosti, 2015

Kanal berita itu membuat berita dengan judul “Nazisme telah berkembang di negara-negara Baltik setelah aksesinya mereka ke dalam UE dan NATO”. Berita ini tentunya dapat menyebabkan disintegrasi karena nazisme telah menjadi bagian kalam bagi penutur Rusia, bahkan Eropa. Berita tersebut tentunya menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah lokal, khususnya penutur Rusia di negara-negara Baltik.

Selain itu, Rusia juga disinyalir secara aktif memainkan kekuatan sibernya selama beberapa dekade terakhir dengan serangan dunia maya yang begitu agresif. Pada tahun 2007, parlemen Estonia, beberapa kementerian, lembaga media, dan bank mengalami serangkaian serangan dunia maya yang parah atas sikap negara tersebut dalam merelokasi monumen era Soviet di ibu kota Tallinn. Kemudian, dugaan peretasan yang dilakukan oleh cracker pro Rusia juga pernah menyerang beberapa fasilitas vital dari negara-negara Baltik. (Kampmark, 2021) Pada akhir 2015, gerbang Internet yang digunakan untuk mengontrol jaringan listrik wilayah Baltik diserang oleh peretas yang bertujuan untuk mengganggu operasi tetapi tidak sampai menyebabkan pemadaman. (Jewkes & Vukmanovic, 2017) Serangan DDoS juga pernah diterima oleh sistem distribusi bensin wilayah Baltik yang mengoordinasikan pengiriman dari tangki penyimpanan ke jaringan pompa bensin. Serangan ini dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan dengan tujuan untuk mengacaukan distribusi pengiriman bensin. STEC atau konverter serial-ke-ethernet sebagai perangkat komunikasi jaringan yang

dimiliki oleh negara-negara Baltik juga pernah menjadi sasaran cracker yang disinyalir berasal dari Rusia. (Paganini, 2017) Seorang pejabat keamanan yang berbasis di Baltik mengatakan serangan dunia maya biasanya meningkat ketika Rusia melakukan latihan militer besar-besaran di dekat perbatasannya dengan negara-negara Baltik. Meskipun demikian, ketika ditanyai Reuters, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyangkal bahwa semua serangan siber tersebut bukan dari Rusia.

2.6 Doktrin Pertahanan Rusia 2014

Doktrin militer Federasi Rusia adalah sistem pandangan negara yang diadopsi secara resmi tentang persiapan pertahanan bersenjata dan perlindungan bersenjata Federasi Rusia. Doktrin Militer, berdasarkan analisis ancaman militer dan ancaman militer terhadap kepentingan Federasi Rusia dan sekutunya merumuskan ketentuan dasar kebijakan militer dan dukungan ekonomi militer untuk pertahanan negara.

Landasan hukum Doktrin militer terdiri dari Konstitusi Federasi Rusia, prinsip-prinsip yang diakui secara umum dan hukum internasional serta perjanjian internasional Federasi Rusia di bidang pertahanan, kontrol senjata dan perlucutan senjata, undang-undang Konstitusi Federal, undang-undang federal dan tindakan hukum Presiden Federasi Rusia dan Pemerintah Federasi Rusia. Doktrin Militer mempertimbangkan ketentuan utama Konsep pembangunan sosial ekonomi jangka panjang Federasi Rusia hingga 2020, Strategi keamanan nasional Federasi Rusia hingga 2020, dan ketentuan terkait Konsep Kebijakan Luar Negeri Rusia Federasi, Doktrin Maritim Federasi Rusia untuk periode hingga 2020, Strategi Pengembangan Zona Arktik Federasi Rusia dan

Keamanan Nasional untuk periode hingga 2020 dan perencanaan dokumen strategis lainnya.

Doktrin Militer mencerminkan komitmen Federasi Rusia untuk menggunakan untuk melindungi kepentingan nasional negara dan kepentingan sekutunya tindakan militer hanya setelah habisnya peluang aplikasi politik, diplomatik, hukum, ekonomi, informasi dan instrumen non-kekerasan lainnya. Ketentuan Doktrin Militer dituangkan dalam pesan Presiden Federasi Rusia kepada Majelis Federal Federasi Rusia dan dapat disesuaikan perencanaan strategis di bidang militer (military planning). Implementasi Doktrin Militer dicapai dengan pemusatan administrasi publik di bidang pertahanan dan keamanan dan dilakukan sesuai dengan undang-undang federal, tindakan hukum pengaturan Presiden Federasi Rusia, Pemerintah Federasi Rusia dan eksekutif federal tubuh.

Doktrin Militer, konsep dasar sebagai berikut:

- a) keamanan militer Federasi Rusia merupakan keadaan perlindungan kepentingan penting individu, masyarakat dan negara dari ancaman militer eksternal dan internal yang terkait dengan penggunaan kekuatan militer atau ancaman kekerasan, ditandai dengan tidak adanya ancaman militer atau kemampuan untuk melawannya;
- b) ancaman militer - suatu keadaan hubungan antar negara bagian atau dalam negeri yang dicirikan oleh serangkaian faktor yang, dalam kondisi tertentu, dapat menyebabkan ancaman militer;

c) ancaman militer - keadaan hubungan antarnegara atau domestik, ditandai dengan kemungkinan nyata konflik militer antara pihak yang bertikai, tingkat kesiapan yang tinggi dari negara (kelompok negara), organisasi separatis (Teroris) untuk menggunakan kekuatan militer (kekerasan bersenjata);

d) konflik militer - izin bentuk konflik antar negara atau intra negara dengan penggunaan kekuatan militer (konsep mencakup semua jenis konfrontasi bersenjata, termasuk perang skala besar, regional, lokal dan konflik bersenjata);

e) konflik bersenjata - konflik bersenjata skala terbatas antar negara (konflik bersenjata internasional) atau pihak yang berseberangan dalam batas wilayah satu negara (konflik bersenjata internal);

f) perang lokal - perang di mana tujuan militer dan politik terbatas dituntut, permusuhan dilakukan dalam batas-batas negara-negara yang bertikai dan yang terutama hanya mempengaruhi kepentingan negara-negara ini (Teritorial, ekonomi, politik dan lainnya);

g) perang regional - perang yang melibatkan beberapa negara di kawasan itu, angkatan bersenjata nasional atau koalisi terkemuka, di mana para pihak mengejar tujuan militer dan politik yang penting;

h) perang skala besar - perang antara negara koalisi atau negara terbesar di komunitas dunia, di mana para pihak mengejar tujuan militer-politik yang radikal. Perang skala besar dapat mengakibatkan eskalasi konflik bersenjata, perang lokal atau regional

dengan melibatkan sejumlah besar negara bagian yang berbeda di dunia. Perang ini akan membutuhkan mobilisasi semua sumber daya material dan kekuatan spiritual yang tersedia dari Negara Pihak;

i) kebijakan militer - kegiatan negara dalam organisasi dan implementasi pertahanan dan keamanan Federasi Rusia, serta kepentingan sekutunya;

j) organisasi militer (selanjutnya - organisasi militer) - seperangkat Kontrol negara dan militer dari Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, pasukan lain, formasi dan badan militer yang dibentuk dalam waktu militer unit khusus (selanjutnya - Angkatan Bersenjata, pasukan lainnya dan organ) yang menjadi dasarnya dan menjalankan kegiatannya dengan sarana militer, dan kompleks industri pertahanan gabungan negara yang ditujukan untuk mempersiapkan pertahanan bersenjata dan perlindungan bersenjata Federasi Rusia;

k) perencanaan militer - menentukan urutan dan metode tujuan dan sasaran organisasi militer, pembangunan dan pengembangan Angkatan Bersenjata, pasukan dan badan lain, aplikasi dan dukungan komprehensif mereka;

l) kesiapan mobilisasi Federasi Rusia - kemampuan Angkatan Bersenjata, pasukan lain dan organ ekonomi Negara dan otoritas federal, otoritas publik dari subyek Federasi Rusia, pemerintah daerah dan organisasi untuk mengimplementasikan rencana mobilisasi;

m) sistem penahanan non-nuklir - kebijakan luar negeri yang kompleks, langkah-langkah teknis militer dan militer yang bertujuan untuk mencegah agresi terhadap Federasi Rusia dengan sarana non-nuklir.

Bahaya militer eksternal utama:

a) kapasitas potensi kekuatan Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan memberikannya fungsi global dilakukan dengan melanggar hukum internasional, pendekatan infrastruktur militer negara-negara anggota NATO ke perbatasan Federasi Rusia, termasuk melalui perluasan lebih lanjut dari memblokir;

b) untuk mendestabilisasi situasi di masing-masing negara dan kawasan serta merusak stabilitas global dan kawasan;

c) penempatan (penumpukan) kontingen militer negara asing (kelompok negara) di wilayah negara yang berbatasan dengan Federasi Rusia dan sekutunya, serta di perairan yang berdekatan, termasuk tekanan politik dan militer terhadap Federasi Rusia;

d) penciptaan dan pengerahan sistem strategis pertahanan rudal, merusak stabilitas global dan melanggar keseimbangan kekuatan di bidang rudal-nuklir, penerapan konsep "serangan global", niat untuk menempatkan senjata di luar angkasa, serta pengerahan senjata non-strategis -sistem nuklir, senjata presisi;

e) klaim teritorial terhadap Federasi Rusia dan sekutunya serta campur tangan dalam urusan internal mereka;

- f) proliferasi senjata pemusnah massal, peluru kendali dan teknologi peluru kendali;
- g) pelanggaran pengaturan internasional negara-negara tertentu, serta kegagalan untuk mematuhi perjanjian internasional yang telah disepakati sebelumnya di bidang pelarangan, pembatasan dan pengurangan persenjataan;
- h) penggunaan kekuatan militer di wilayah yang berdekatan dengan Federasi Rusia dan sekutunya yang melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan aturan hukum internasional lainnya; dan) adanya (terjadinya) fokus dan konflik yang meningkat di wilayah negara-negara yang berbatasan dengan Federasi Rusia dan sekutunya;
- i) meningkatnya ancaman ekstremisme global (terorisme) dan manifestasi barunya dalam kurangnya kerjasama internasional yang efektif melawan terorisme, ancaman nyata serangan teroris yang menggunakan zat kimia beracun dan radioaktif skala ekspansi kejahatan terorganisir transnasional, terutama perdagangan gelap senjata dan narkoba;
- j) adanya (terjadinya) fokus ketegangan etnis dan Antaragama, kegiatan kelompok radikal bersenjata internasional Perusahaan militer swasta asing di wilayah yang berbatasan dengan perbatasan negara Federasi Rusia dan sekutu perbatasannya, serta adanya konflik regional, tumbuhnya separatisme dan ekstremisme di beberapa wilayah dunia;

k) penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam tujuan militer-politik untuk tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional, yang bertujuan melawan kedaulatan, kemerdekaan politik, integritas wilayah negara dan mengancam perdamaian internasional, keamanan, stabilitas global dan regional;

l) pendirian di negara bagian yang berdekatan dengan rezim Federasi Rusia, termasuk sebagai akibat dari penggulingan otoritas publik yang sah yang kebijakannya mengancam kepentingan Federasi Rusia;

m) kegiatan subversif dari layanan dan organisasi khusus negara asing dan koalisi mereka melawan Federasi Rusia.

Bahaya militer internal utama:

a) kegiatan yang ditujukan untuk mengubah sistem konstitusional Federasi Rusia dengan kekerasan dan mendestabilisasi situasi politik dan sosial suatu negara, gangguan fungsi kekuasaan negara, pemerintahan penting, objek militer, dan infrastruktur informasi Federasi Rusia;

b) kegiatan organisasi teroris dan individu yang bertujuan merongrong kedaulatan, persatuan dan pelanggaran integritas wilayah Federasi Rusia;

c) kegiatan informasi mempengaruhi penduduk, terutama warga negara muda, yang harus merusak tradisi sejarah, spiritual dan patriotik dalam mempertahankan Tanah Air;

d) memprovokasi ketegangan etnis dan sosial, ekstremisme, mengobarkan kebencian atau permusuhan etnis dan agama.

Ancaman militer utama:

a) memperburuk situasi politik-militer (Hubungan antarnegara bagian) dan menciptakan kondisi untuk penggunaan kekuatan militer;

b) mencegah operasi Kontrol publik dan militer Federasi Rusia, pelanggaran fungsi kekuatan nuklir strategisnya, sistem peringatan rudal, ruang kontrol ruang angkasa, fasilitas penyimpanan amunisi nuklir, energi nuklir, industri Atom, kimia, Farmasi dan medis dan objek lain yang berpotensi berbahaya;

c) pembentukan dan pelatihan kelompok bersenjata ilegal dan kegiatan mereka di wilayah Federasi Rusia atau di wilayah sekutunya;

d) demonstrasi kekuatan selama wilayah latihan negara-negara yang berbatasan dengan Federasi Rusia dan sekutunya;

e) revitalisasi angkatan bersenjata masing-masing negara (kelompok negara) dengan melakukan mobilisasi sebagian atau total, transfer negara dan manajemen militer negara-negara tersebut untuk bekerja dalam kondisi masa perang.

Sifat dan Ciri Konflik Peperangan Modern :

- a) Penggunaan terpadu kekuatan militer, politik, ekonomi, informasi dan tindakan non-militer lainnya, dilaksanakan dengan penggunaan ekstensif potensi protes penduduk, dan pasukan operasi khusus;
- b) penggunaan besar-besaran sistem senjata dan teknologi militer, presisi, senjata hipersonik, alat perang elektroniknya, senjata berdasarkan prinsip fisik baru, efisiensinya sebanding dengan senjata nuklir, sistem informasi manajemen, dan pesawat tak berawak serta kendaraan laut otonom yang mengendalikan senjata robotik dan peralatan militer;
- c) efek pada musuh di seluruh kedalaman wilayahnya secara bersamaan di ruang informasi global, ruang angkasa, darat dan laut;
- d) selektivitas dan tingkat penghancuran objek yang tinggi, kecepatan manuver pasukan (pasukan) dan tembakan, penggunaan berbagai kelompok pasukan (pasukan);
- e) mengurangi parameter waktu Pelatihan untuk permusuhan;
- f) memperkuat sentralisasi dan otomatisasi pasukan dan senjata sebagai hasil dari transisi dari sistem manajemen vertikal yang ketat ke jaringan global sistem manajemen otomatis pasukan (pasukan) dan senjata;
- g) penciptaan zona perang permanen di wilayah pihak yang bertikai;
- h) partisipasi dalam permusuhan kelompok bersenjata tidak teratur dan perusahaan militer swasta;

i) penggunaan metode Tindakan tidak langsung dan asimetris;

j) penggunaan kekuatan politik dan gerakan sosial yang didanai dan dijalankan secara eksternal.

Senjata nuklir akan tetap menjadi faktor penting mencegah perang nuklir dan konflik militer dengan penggunaan senjata konvensional (Perang skala besar, perang regional). Tugas utama kebijakan militer Federasi Rusia ditentukan oleh Presiden Federasi Rusia Menurut undang-undang federal, Strategi keamanan nasional Federasi Rusia hingga tahun 2020 dan doktrin militer. Kebijakan militer Federasi Rusia yang ditujukan untuk menahan dan mencegah konflik militer meningkatkan organisasi militer, bentuk dan metode penggunaan angkatan bersenjata, pasukan dan badan lain meningkatkan kesiapan mobilisasi untuk memastikan pertahanan dan keamanan Federasi Rusia, sebagaimana serta kepentingan sekutunya. Federasi Rusia memberikan kesiapan terus-menerus dari angkatan bersenjata, pasukan dan badan lain untuk pencegahan dan pencegahan konflik militer, untuk perlindungan bersenjata Federasi Rusia dan sekutunya sesuai dengan hukum internasional dan perjanjian internasional Federasi Rusia. Konflik militer non-nuklir, serta konflik militer lainnya, sebagai dasar kebijakan militer Federasi Rusia.

Tugas utama Federasi Rusia untuk menahan dan mencegah konflik bersenjata:

- a) evaluasi dan prediksi situasi militer-politik di tingkat global dan regional, serta keadaan hubungan bilateral di bidang militer-politik dengan menggunakan sarana teknis modern dan teknologi informasi;
- b) untuk menetralkan kemungkinan bahaya militer dan ancaman militer terhadap sarana politik, diplomatik dan non-militer lainnya;
- c) menjaga stabilitas global dan regional dan potensi pencegahan nuklir pada tingkat yang memadai;
- d) pemeliharaan Angkatan Bersenjata, pasukan dan badan lain yang diberi tingkat kesiapan untuk penggunaan tempur;
- e) pemeliharaan kesiapan mobilisasi ekonomi Federasi Rusia, otoritas negara, pemerintah daerah dan organisasi sesuai dengan bidang yang ditetapkan pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan penyelesaian masalah di masa perang;
- f) menggabungkan upaya negara, masyarakat dan individu untuk Perlindungan Federasi Rusia, pengembangan dan penerapan langkah-langkah yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pendidikan patriotik militer warga negara Federasi Rusia dan pelatihan untuk dinas militer;
- g) memperluas jangkauan mitra dan kerja sama pembangunan dengan mereka atas dasar kepentingan bersama di bidang penguatan keamanan internasional sesuai dengan ketentuan Piagam PBB, prinsip-prinsip yang diakui secara umum dan hukum internasional serta perjanjian internasional Federasi Rusia perluasan interaksi dengan

Negara - anggota BRICS (Republik Federal Brasil, Federasi Rusia, Republik India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Afrika Selatan);

h) memperkuat sistem keamanan kolektif dalam kerangka Collective Security Treaty Organization (CSTO) dan meningkatkan kapasitasnya, memperkuat kerjasama di bidang keamanan internasional dalam kerangka Commonwealth of Independent States (CIS), Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) dan Shanghai Cooperation Organization (SCO), interaksi dengan Republik Abkhazia dan Republik Ossetia Selatan untuk memastikan pertahanan dan keamanan bersama, menjaga dialog yang setara dalam keamanan Eropa dengan Uni Eropa dan NATO , membantu membangun model keamanan baru di kawasan Asia-Pasifik berdasarkan basis non-blok kolektif;

i) kepatuhan terhadap perjanjian internasional Federasi Rusia untuk pengurangan dan pembatasan senjata rudal nuklir;

j) kesimpulan dan implementasi perjanjian di bidang kontrol senjata konvensional, serta langkah-langkah untuk memperkuat rasa saling percaya;

k) membentuk mekanisme kerjasama bilateral dan multilateral yang saling menguntungkan dalam Melawan kemungkinan ancaman rudal, termasuk pada kebutuhan pembentukan pertahanan rudal bersama dengan partisipasi yang setara dari Rusia;

- l) melawan upaya oleh masing-masing negara (kelompok Negara) untuk mencapai keunggulan militer dengan mengerahkan sistem pertahanan rudal strategis, menempatkan senjata di ruang angkasa, menyebarkan sistem senjata presisi konvensional yang strategis;
- m) perjanjian internasional tentang pencegahan penempatan senjata apa pun di ruang angkasa;
- n) koordinasi dalam elemen peraturan PBB regulasi kegiatan ruang implementasi yang aman, termasuk operasi keamanan di luar angkasa dalam pemahaman teknis umum mereka;
- o) memperkuat kapasitas Federasi Rusia di bidang pemantauan objek dan peristiwa di ruang dekat Bumi, termasuk mekanisme kerja sama internasional di bidang ini;
- p) partisipasi dalam kegiatan pemeliharaan perdamaian internasional, termasuk di bawah naungan PBB dan dalam kerangka kerja sama dengan organisasi internasional (regional);
- q) pengembangan dan adopsi mekanisme internasional yang memantau kepatuhan terhadap Konvensi tentang Larangan Pengembangan, produksi dan Penimbunan Senjata Beracun Bakteriologis (Biologis) dan Pemusnahannya;
- r) berpartisipasi dalam perang melawan terorisme internasional;

s) menciptakan kondisi untuk pengurangan risiko penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam tujuan militer dan politik untuk tindakan, bertentangan dengan hukum internasional, melawan kedaulatan, kemerdekaan politik, integritas teritorial negara dan mewakili ancaman perdamaian internasional, keamanan, global dan regional stabilitas.

Federasi Rusia menganggap sah untuk menggunakan Angkatan Bersenjata dan pasukan serta badan lain untuk mengusir agresi terhadapnya dan (atau) sekutunya, dan mempertahankan (pemulihan) dunia untuk menangani Dewan Keamanan PBB dan struktur keamanan kolektif lainnya, dan untuk memastikan perlindungan warganya yang tinggal di luar Federasi Rusia, sesuai dengan prinsip dan norma yang diakui secara umum hukum internasional dan perjanjian internasional Federasi Rusia. Penggunaan Angkatan Bersenjata, pasukan lain dan badan-badan masa damai dengan keputusan Presiden Federasi Rusia untuk menetapkan undang-undang Federal. Dalam hal ini, penggunaan kekuatan militer dan organ lain dilakukan secara kuat, terarah dan terintegrasi atas dasar analisis dini dan berkesinambungan terhadap situasi militer-politik dan militer-strategis saat ini.

Federasi Rusia memandang serangan bersenjata terhadap negara - Negara Persatuan atau kegiatan apa pun yang menggunakan kekuatan militer terhadapnya sebagai tindakan agresi terhadap Negara Persatuan dan menerapkan tindakan tanggapan. Federasi Rusia menganggap serangan bersenjata terhadap negara - anggota CSTO sebagai agresi terhadap semua negara - anggota CSTO dan dalam hal ini akan

dilakukan tindakan sesuai dengan Perjanjian tentang Keamanan Kolektif. Sebagai bagian dari kegiatan strategis kekuatan penahanan, sifat Federasi Rusia menyediakan penggunaan senjata berpemandu presisi.

Federasi Rusia berhak untuk menggunakan senjata nuklir sebagai tanggapan terhadap penggunaannya dan (atau) sekutunya nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya, serta dalam hal agresi terhadap Federasi Rusia dengan penggunaan konvensional senjata, ketika keberadaan negara terancam. Keputusan untuk menggunakan senjata nuklir diambil oleh Presiden Federasi Rusia. Menghadapi Angkatan Bersenjata, pasukan lain dan badan tugas yang diatur dan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pertahanan Federasi Rusia, keputusan Presiden Federasi Rusia, perintah dan arahan Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan hukum normatif lainnya tindakan Federasi Rusia dan perencanaan dokumen strategis pertahanan.

Federasi Rusia menyumbangkan pasukan untuk pasukan penjaga perdamaian CSTO untuk berpartisipasi dalam operasi Pemeliharaan Perdamaian berdasarkan keputusan Dewan Keamanan Kolektif CSTO. Federasi Rusia menyumbangkan pasukan ke Pasukan Reaksi Cepat Kolektif CSTO, pasukan Kolektif mengerahkan cepat keamanan kolektif Asia Tengah untuk menanggapi dengan cepat ancaman militer terhadap Negara - anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif dan keputusan tugas lain yang ditentukan oleh Kolektif CSTO Dewan Keamanan.

Tugas kerjasama militer-teknis ditentukan oleh Presiden Federasi Rusia sesuai dengan undang-undang federal. (Presiden & Parlemen Rusia, 2014)

2.7 Hadirnya OSCE Sebagai Organisasi Kerjasama Dan Keamanan Terbesar

Di Eropa

Pada tahun 1954, pada pertemuan menteri luar negeri dari empat kekuatan besar (AS, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet), Uni Soviet pertama kali mengusulkan untuk mengadakan konferensi tentang keamanan di Eropa. AS dan Sekutunya menolak proposal tersebut, karena ditawarkan sebagai pengganti NATO dan tidak memberikan partisipasi AS. Namun, dalam iklim politik yang membaik pada akhir 1960-an, negara-negara NATO mulai mempertimbangkan untuk memperluas proses détente di Eropa.

Prasyarat utama NATO untuk mengadakan konferensi tentang keamanan di Eropa dipenuhi beberapa tahun kemudian, pada tahun 1971, dengan penandatanganan Perjanjian Quadripartit antara AS, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Setelah konsultasi awal di Musim Dingin 1972/73, untuk pertama kalinya Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE) diadakan di Helsinki pada tahun 1973, dengan partisipasi 35 Negara. Konferensi diakhiri dengan terbentuknya undang-undang Akhir Helsinki pada tahun 1975. Undang-Undang Akhir Helsinki adalah dokumen yang mengikat secara politik, bukan hukum, yang menetapkan prinsip-prinsip perilaku dalam tiga bidang: militer-politik, ekonomi dan lingkungan serta hak asasi manusia.

Dari tahun 1975 hingga 1990, CSCE berfungsi sebagai serangkaian konferensi dan pertemuan di mana komitmen baru dinegosiasikan dan pelaksanaannya ditinjau secara berkala. Pertemuan KTT Paris pada tahun 1990 menandai awal dari pelembagaan yang ditujukan untuk menjawab tantangan yang muncul pada periode

pasca-Perang Dingin. Piagam Paris untuk New Europe membentuk infrastruktur administrasi permanen, yang mencakup Sekretariat, Pusat Pencegahan Konflik, dan Kantor Pemilihan Bebas. Perjanjian kontrol senjata utama, traktat tentang Conventional Armed Forces in Europe (CFE) juga disepakati di sela-sela KTT Paris. (OSCE, 2018)

Perkembangan situasi keamanan di Eropa pada tahun 1990-an, terutama disintegrasi Yugoslavia dan Uni Soviet, menyebabkan perubahan mendasar dalam CSCE untuk menghadapi tantangan baru, proses pelembagaan dipercepat dan diperluas; mekanisme baru diciptakan, kemampuan operasional ditingkatkan dan implementasi komitmen diperkuat. Perkembangan ini tercermin dalam perubahan nama pada KTT Budapest tahun 1994 dari CSCE menjadi Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). KTT Lisbon tahun 1996 memperkuat peran kunci OSCE dalam mendorong keamanan dan stabilitas di ketiga dimensi. Ini juga merangsang pengembangan Piagam OSCE untuk Keamanan Eropa, yang akhirnya diadopsi pada KTT Istanbul, pada November 1999. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan kemampuan operasional organisasi dan memperkuat kerja sama dengan para mitranya.

Konsep mengenai misi yang harus dijalankan oleh OSCE berasal dari awal 1990-an. Misi ini bersumber dari kebutuhan untuk menangani konflik intra-Negara pada periode transisi pasca-Komunis. Organisasi ini sekarang mempekerjakan sekitar

2.500 staf dalam 16 misi dan kegiatan lapangan yang berlokasi di Eropa Tenggara, Kaukasus, Eropa Timur, dan Asia Tengah.

Meskipun tidak ada dua mandat yang sama, secara umum tujuan misi ada dua. Pertama, untuk memfasilitasi proses politik yang dimaksudkan untuk mencegah atau menyelesaikan konflik, dan untuk memastikan bahwa komunitas OSCE terus mendapat informasi tentang perkembangan di negara-negara di mana misi berada. Kedua, Mandat, komposisi dan operasi misi dan kegiatan lapangan lainnya semakin bervariasi, menggarisbawahi fleksibilitas instrumen ini. Namun, untuk semua misi, masalah dimensi manusia, demokrasi dan membangun supremasi hukum adalah tugas utama.

OSCE saat ini secara aktif berfokus untuk menangani di beberapa bidang, seperti kontrol senjata, manajemen perbatasan, memerangi perdagangan manusia, memerangi terorisme, pencegahan dan resolusi konflik, aktivitas ekonomi, pendidikan, pemilu, kegiatan lingkungan, kesetaraan gender, pemerintahan yang bagus, hak asasi manusia, kebebasan pers serta perkembangan media, reformasi, kerja sama militer, hak minoritas, pemolisian, supremasi hukum, soleransi dan non-diskriminasi. (OSCE, 2022)